



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan laporan Keuangan dan laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan (lihat Perbup SOTK masing-masing SKPD) Dinas Ketenagakerjaan, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2023.

Tujuan Penyusunan laporan keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2023.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- z. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
- aa. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 19);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 Nomor 5);
- ee. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 19);
- ff. Peraturan Bupati Batang 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 73);
- gg. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 51);
- hh. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9);
- ii. Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 44);
- jj. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 Nomor 50);



3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2023 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode tahun anggaran 2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
2. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - a. Ekuitas Awal
 - b. Surplus / Defisit LO
 - c. Koreksi Kesalahan Mendasar
 - d. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi belanja.

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2023

NO REK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	(%)
1	WAJIB	11.387.605.500	9.290.010.323	2.097.595.177	81,58002
2	PILIHAN	152.500.000	152.361.776	138.224	99,90936
	JUMLAH	11.540.105.500	9.442.372.099		



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

a. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.501.660.040,00	5.396.530.467,00	105.129.573,00	98,08912997
2	Belanja Modal	7.373.267.920,00	5.376.771.980,00	1.996.495.940,00	72,92250924
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH	12.874.927.960,00	10.773.302.447,00	2.101.625.513,00	83,67660371

Berdasarkan rincian di atas, realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya maka tahun 2023 lebih rendah Rp 2.101.625.513,00 atau 83,67%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 maka realisasi belanja tahun 2023 naik sebesar Rp 1.219.812.576,00 atau 112,77%. Perbandingan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

		2023		2022	
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.501.660.040,00	5.396.530.467,00	6.457.398.021,00	
2	Belanja Modal	7.373.267.920,00	5.376.771.980,00	3.096.091.850,00	
3	Belanja Tak terduga				
	JUMLAH	12.874.927.960,00	10.773.302.447,00	9.553.489.871,00	

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

1) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Belanja operasi SKPD Dinas Ketenagakerjaan terinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi:			
Belanja Pegawai	2.335.785.360,00	2.249.638.005,00	2.355.527.697,00
Belanja Barang dan Jasa	3.070.874.680,00	3.051.892.462,00	4.056.870.324,00
Belanja Hibah	95.000.000,00	95.000.000,00	45.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	<u>5.501.660.040,00</u>	<u>5.396.530.467,00</u>	<u>6.457.398.021,00</u>

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi tahun 2023 lebih rendah Rp 105.129.573,00 atau 1,91%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi belanja operasi tahun 2023 lebih kecil Rp 1.060.867.554,00 atau 16,43%.

Berikut penjelasan rincian belanja operasi tahun 2023 dan 2022 :

a) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.593.814,00	1.389.403.071,00	97,60	(34.190.743,00)	(2,40)
Tambahan Penghasilan ASN	859.491.546,00	807.534.934,00	93,95	(51.956.612,00)	(6,05)
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN	52.700.000,00	52.700.000,00	100,00	-	-
Gaji dan tunjangan DPRD			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Gaji dan tunjangan KDH/WKDH			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan			#DIV/0!		
DPRD serta KDH/WKDH			#DIV/0!		#DIV/0!
Belanja Pegawai BOS			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai BLUD			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Jumlah	<u>2.335.785.360,00</u>	<u>2.249.638.005,00</u>	<u>96,31</u>	<u>(86.147.355,00)</u>	<u>(3,69)</u>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp 2.249.638.005,00 (96,31%) dengan sisa anggaran sebesar Rp86.147.355,00 (3,69%).

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja sebagai berikut:

Contoh :

- (1) Gaji dan tunjangan tidak terserap sebesar Rp 34.190.743,00
- (2) Tambahan penghasilan ASN tidak terserap sebesar Rp 51.956.612,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Belanja Barang dan Jasa	2023				
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	lebih/kurang	%
Belanja Barang	1.105.853.690,00	1.103.954.250,00	99,83	(1.899.440,00)	(0,17)
Belanja jasa	1.185.010.800,00	1.169.197.278,00	98,67	(15.813.522,00)	(1,35)
Belanja Pemeliharaan	84.263.980,00	84.188.400,00	99,91	(75.580,00)	(0,09)
Belanja Perjalanan Dinas	685.746.210,00	684.552.534,00	99,83	(1.193.676,00)	(0,17)
Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	#DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa BOS			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa BLUD			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Jumlah	3.070.874.680,00	3.051.892.462,00	99,38	(18.982.218,00)	(0,62)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa pada tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp 3.070.874.680,00 atau 99,38% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp 18.982.218,00 atau 0,67%.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja barang sebagai berikut :

- Belanja barang tidak terserap sebesar Rp 1.899.440,00
- Belanja jasa tidak terserap sebesar Rp 15.813.522,00
- Belanja pemeliharaan tidak terserap sebesar Rp 75.580,00
- Belanja perjalanan dinas tidak terserap sebesar Rp 1.193.676,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang sesuai bagan akun standar (BAS) rincian obyek bahan habis pakai, bahan material, cetak dan penggandaan, makan dan minum, pakaian dinas, belanja barang dana BOS direklas kea kun belanja barang. Rincian obyek jasa kantor, premi asuransi, sewa, jasa belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek, jasa konsultasi dan belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pembicara/praktisi/pakar direklas ke akun belanja jasa. Rincian perawatan kendaraan bermotor dan pemeliharaan direklas ke akun pemeliharaan. Sedangkan rincian obyek perjalanan dinas direklas ke akun belanja perjalanan dinas.

c) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 dari yang dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 terealisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau 100%. Sedangkan apabila dibandingkan



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp50.000.000,00
 Atau 111,11%

Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2023 serta perbandingannya
 dengan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Belanja Hibah	2023				
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	lebih/kurang	%
Hibah Kepada Pemerintah Pusat			■ #DIV/0!	■ #DIV/0!	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	-	#DIV/0!
Belanja Hibah Dana BOS			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			#DIV/0!	-	#DIV/0!
Jumlah	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	-	-

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Belanja Modal:	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	97.790.420,00	95.993.200,00	97.125.550,00
Belanja Gedung dan Bangunan	6.692.477.500,00	4.701.461.310,00	2.998.966.300,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	583.000.000,00	579.317.470,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya			
	7.373.267.920,00	5.376.771.980,00	3.096.091.850,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal tahun 2023 lebih rendah Rp1.996.495.940,00 atau 27,08%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi belanja modal tahun 2023 lebih besar Rp2.280.680.130,00 atau 73,66%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap.

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

	20:
	<u>Anggaran (Rp)</u>
Belanja Modal Pengadaan Tanah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin :	
Belanja Modal Alat Besar	
Belanja Modal Alat Angkutan	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
Belanja Modal Alat Pertanian	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	52.608.560
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	
Belanja Modal Alat Laboratorium	
Belanja Modal Komputer	45.181.860
Belanja Modal Alat Eksplorasi	
Belanja Modal Alat Pengeboran	
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	
Belanja Modal Alat Peraga	
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
Belanja Modal Rambu-Rambu	
Belanja Modal Peralatan Olahraga	
	<u>97.790.420</u>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.647.477.500
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.045.000.000
	<u>6.692.477.500</u>
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	583.000.000
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
Belanja Modal Bangunan Air	583.000.000
Belanja Modal Instalasi	
Belanja Modal Jaringan	
	<u>583.000.000</u>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
Belanja Modal Barang Bercorak	
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
Belanja Modal aset tidak berwujud	
	<u>-</u>

Berikut kami sampaikan penjelasan realisasi masing-masing belanja modal dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak terserap sebesar Rp1.797.220,00 (1,84%)
- (2) Belanja Modal Gedung dan bangunan tidak terserap sebesar Rp 1.991.016.190,00 (29,75%)
- (3) Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terserap sebesar Rp3.682.530,00 (0,63%)

2. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Dinas Ketenagakerjaan terbagi dalam:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

<i>Uraian</i>	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1) Aset Lancar	588.750,00	382.500,00
2) Investasi Jangka Panjang	-	
3) Aset Tetap	13.850.158.145,57	8.018.553.123,00
4) Aset Lainnya	-	6.899.313,00
	<u>13.850.746.895,57</u>	<u>8.025.834.936,00</u>

Berdasarkan rincian aset dalam tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp 5.824.911.959,57 atau 72,57%.

1) ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a) Kas di Kasda	-	
b) Deposito berjangka		
c) Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
d) Kas di Bendahara Penerimaan	-	
e) Kas di BLUD	-	
f) Kas Lainnya	-	
g) Investasi jangka pendek		
h) Piutang Pajak Daerah	-	
i) Piutang Retribusi	-	
j) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
k) Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
l) Penyisihan Piutang	-	
m) Beban Dibayar Dimuka	-	
n) Piutang Transfer	-	
o) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
p) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
q) Piutang Lainnya	-	
r) Persediaan	588.750,00	382.500,00
	<u>588.750,00</u>	<u>382.500,00</u>

a) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(1) Persediaan ATK/Pakai Habis	588.750,00	382.500,00
(2) Persediaan Obat-obatan medis	-	-
(3) Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
(4) Persediaan Rumah tangga	-	-
(5) Persediaan Benda Berharga	-	-
(6) Persediaan Lainnya	-	-
	<u>588.750,00</u>	<u>382.500,00</u>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum diserahkan kepada masyarakat.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

(1) Persediaan alat tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp588.750,00 dengan rincian Kertas HVS, amplop besar, amplop kecil, Isi Staples kecil isi 20 box, Ballpoint Bolpenku Black, Binder clip hitam No. 155, Binder clip hitam No. 105

2) **ASET TETAP**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp13.850.158.145,57 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Aset tetap	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah	1.719.485.496,00	-	-	1.719.485.496,00
Peralatan	2.516.055.041,00	924.952.334,15		3.441.007.375,15
Gedung dan	6.112.693.300,00	4.701.461.310,00	3.322.228.460,00	7.491.926.150,00
Jalan, Irigasi	674.226.595,00	579.317.470,00		1.253.544.065,00
Aset tetap lainr	4.507.121,00			4.507.121,00
Konstruksi dalam	-	3.322.228.460,00		3.322.228.460,00
	<u>11.026.967.553,00</u>	<u>9.527.959.574,15</u>	<u>3.322.228.460,00</u>	<u>17.232.698.667,15</u>

Penjelasan masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



a) Penambahan aset tetap

(1) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal 2023 (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	95.993.200,00
Gedung dan Bangunan	4.701.461.310,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	579.317.470,00
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	5.376.771.980,00

(2) Penambahan Aset dari ubah kondisi terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

Uraian	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	828.959.134,15
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	828.959.134,15

(3) Penambahan aset dari reklas antar rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

Uraian	Reklas antar Rekening (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	3.322.228.460,00
	3.322.228.460,00

b) Pengurangan Aset tetap

(1) Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi rekening pada kelompok aset sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

<i>Uraian</i>	Reklasifikasi Rekening (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	3.322.228.460,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	3.322.228.460,00

a) Tanah

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan.

Nilai Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 1.719.485.496,00 sama dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.719.485.496,00.

Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 berasal dari belanja modal dan penambahan serta pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

b) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.441.007.375,15 naik sebesar Rp 924.952.334,15 atau 36,76% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2022 sebesar Rp 2.516.055.041,00.

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Peralatan dan Mesin	Neraca Per 31 Des 2023	Neraca Per 31 Des 2022	Naik (turun)
Alat-alat besar	-	-	-
Alat-alat angkutan	970.728.671,00	970.728.671,00	-
alat-alat bengkel dan alat ukur	166.828.000,00	166.828.000,00	-
alat-alat pertanian dan peternakan	-	-	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	1.049.149.420,00	998.256.220,00	50.893.200,00
alat-alat studio dan komunikasi	18.333.800,00	18.333.800,00	-
alat-alat kedokteran dan Kesehatan	-	-	-
alat-alat laboratorium	33.680.000,00	33.680.000,00	-
Alat Persenjataan	-	-	-
Komputer	1.202.287.484,15	328.228.350,00	-
Alat produksi, pengolahan dan pemukiman	-	-	-
Alat bantu eksplorasi	-	-	-
Rambu-rambu	-	-	-
Peralatan Olah Raga	-	-	-
Peralatan proses/ Produksi	-	-	-
Jumlah	3.441.007.375,15	2.516.055.041,00	50.893.200,00

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2023 berasal mutasi dengan rincian sebagai berikut:

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp 50.893.200,00 terdiri dari belanja modal.

c) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.491.926.150,00 naik sebesar Rp 1.379.232.850,00 atau 22,56% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2022 sebesar Rp 6.112.693.300,00.

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2023 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp 4.701.461.310,00 terdiri dari belanja modal

(2) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.322.228.460,00 berasal dari:



	<u>Mutasi Kurang (Rp)</u>
Penghapusan	
Mutasi ke SKPD	
Hibah	
Koreksi	
Extracountable	
Ubah Kondisi	
BM tidak menjadi aset	
Reklasifikasi	3322228460
	<u><u>3322228460</u></u>

Reklasifikasi aset karena konstruksi dalam pengerjaan.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.253.544.065,00 naik sebesar Rp 579.317.470,00 atau 85,92% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2022 sebesar Rp 674.226.595,00.

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2023:

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jalan dan Jembatan	276.800.874	276.800.874
Bangunan Air	648.684.388	69.366.918
Instalasi	119.941.003	119.941.003
Jaringan	208.117.800	208.117.800
	<u>1.253.544.065</u>	<u>674.226.595</u>

Niai Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2023 berasal dari mutasi penambahan sebagai berikut :

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp 579.317.470,00 berasal dari belanja modal.

e) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset tetap lainnya yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.507.121,00 sama dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2022.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.322.228.460,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00. Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 3.322.228.460,00 atau 100%.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pembangunan Gedung BLK Batang



b. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari :

Uraian	Neraca Per 31 Des 2023 (Rp)	Neraca Per 31 Des 2022 (Rp)	Naik (turun) (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	1.754.214,00	1.132.750,00	621.464,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	1.754.214,00	1.132.750,00	621.464,00

1) Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban jangka pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	1.754.214,00	1.132.750,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	1.754.214,00	1.132.750,00

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

a) Hutang Belanja

Meliputi Utang air bulan Desember 2023 yang baru dibayar bulan Januari 2024 sebesar Rp 1.754.214,00.

c. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas	13.848.992.681,57	8.024.702.186,00
	13.848.992.681,57	8.024.702.186,00



3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a. BEBAN-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2023, beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 5.771.071.780,28 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 6.687.641.007,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp 916.569.226,72 atau 13,71% Berikut realisasi beban 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 :

Beban Persediaan	1.103.748.000,00	1.193.468.784,00	(89.720.784,00)	(92,48)
Beban Jasa	1.169.818.742,00	2.172.018.468,00	(1.002.199.726,00)	53,86
Beban Pemeliharaan	84.188.400,00	61.141.200,00	23.047.200,00	137,70
Beban Perjalanan Dinas	684.552.534,00	490.859.082,00	193.693.452,00	139,46
Beban hibah	105.000.000,00	185.378.390,00	(80.378.390,00)	56,64
Beban Bantuan sosial	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan dan amortisasi	374.126.099,28	298.786.367,00	75.339.732,28	125,22
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
Beban transfer	-	-	-	-
	<u>5.771.071.780,28</u>	<u>6.687.641.007,00</u>	<u>(916.569.226,72)</u>	<u>86,29</u>

1) Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai di SKPD Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.249.638.005,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.285.988.716,00 mengalami penurunan sebesar Rp 36.350.711,00 atau sebesar 1,59%.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Beban Pegawai	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.403.071,00	1.416.341.858,00	(26.938.787,00)	(1,90)
Tambahan Penghasilan	807.534.934,00	910.770.839,00	(103.235.905,00)	(11,34)
Tambahan Penghasilan berdasarkan	52.700.000,00	28.415.000,00	24.285.000,00	
Belanja Gaji dan			-	
Belanja Gaji dan			-	
Belanja Penerimaan			-	#DIV/0!
Lainnya Pimpian &				
Belanja Pegawai BOS			-	-
Belanja Pegawai BLUD				
	2.249.638.005,00	2.355.527.697,00	(105.889.692,00)	(4,50)

Berikut kami sampaikan perbedaan (selisih) beban pegawai LO dengan belanja pegawai LRA sebagai berikut :

Beban Pegawai	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.593.814,00	1.423.593.814,00	-
Tambahan Penghasilan ASN	859.491.546,00	859.491.546,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	52.700.000,00	52.700.000,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan			-
Belanja Gaji dan Tunjangan			-
Belanja Penerimaan Lainnya			-
Pimpian & Anggota DPRD Serta			-
Belanja Pegawai BOS			-
Belanja Pegawai BLUD			-
	2.335.785.360,00	2.335.785.360,00	-

Selisih LO-LRA pada akun beban pegawai sebesar Rp 0,00.

2) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.103.748.000,00 sedangkan pada tahun 2022 beban persediaan adalah sebesar Rp 1.193.468.784,00 sehingga berkurang sebesar Rp 89.720.784,00 atau 7,52%.

Perbandingan rincian beban tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Beban Persediaan	Realisasi 2023(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/turun (Rp)
Belanja Barang	1.103.954.250,00	1.333.608.574,00	- 229.654.324,00
Belanja Barang dan Jasa BOS (yg menjadi beban persediaan)			-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (yg mjd beban persediaan)			-
Jumlah	1.103.954.250,00	1.333.608.574,00	



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Sedangkan perbandingan atau selisih LO – LRA pada akun beban persediaan sebagai berikut:

Beban Persediaan	LO 2023(Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Barang	1.103.748.000	1.103.748.000	-
Jumlah	1.103.748.000	1.103.748.000	

Selisih LRA – LO pada akun beban persediaan sebesar Rp 0,00.

(1)

3) **Beban Jasa**

Beban jasa merupakan beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang.

Beban jasa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.169.818.742,00 sedangkan pada tahun 2022 beban jasa adalah sebesar Rp 2.172.018.468,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 1.002.199.726,00 atau turun 46,13%.

Beban Jasa terdiri dari :

Beban Jasa	Realisasi 2023(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/turun (Rp)
Belanja Jasa	1.169.197.278	2.171.261.468	- 1.002.064.190
Belanja Barang dan Jasa			
BLUD (yg mjd beban jasa)			-
Belanja Barang dan Jasa			
BOS (yg mjd beban jasa)			-
Jumlah	1.169.197.278	2.171.261.468	- 1.002.064.190

Sedangkan perbandingan atau selisih LO-LRA pada akun beban jasa adalah sebagai berikut:

Beban Jasa	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Jasa	1.169.818.742	1.169.197.278	621.464
Belanja Barang dan Jasa BLUD			-
Belanja barang dan Jasa BOS			-
Jumlah	1.169.818.742	1.169.197.278	621.464

Perbandingan atau selisih LO-LRA pada akun beban jasa sebesar Rp 621.464,00 yang merupakan selisih dari utang belanja air tahun 2023 sebesar Rp 1.754.214,00 dengan utang belanja air tahun 2022 sebesar Rp 1.132.750,00.

4) **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan merupakan beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.



Beban pemeliharaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 84.188.400,00 sedangkan pada tahun 2022 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp 61.141.200,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 23.047.200,00 atau naik 37,70%.

Beban pemeliharaan terdiri dari :

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022(Rp)	Naik/turun (Rp)
Belanja Pemeliharaan	84.188.400	61.141.200	23.047.200
Belanja Barang dan Jasa BLUD (yg mjd beban pemeliharaan)			-
Belanja Barang dan Jasa BOS (yg mjd beban pemeliharaan)			-
Jumlah	84.188.400	61.141.200	23.047.200

Sedangkan perbandingan atau selish LO-LRA pada akun beban pemeliharaan sebesar Rp0,00.

5) **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya ASN atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 684.552.534,00 sedangkan pada tahun 2022 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 490.859.082,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 193.693.452,00 atau naik 39,46%.

Beban perjalanan dinas terdiri dari :

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/turun (Rp)
Belanja Perjalanan dinas	684.552.534	490.859.082	193.693.452
Belanja Barang dan Jasa BLUD (yg mjd beban perjalanan dinas)			-
Belanja Barang dan Jasa BOS (yg mjd beban perjalanan dinas)			-
Jumlah	684.552.534	490.859.082	193.693.452

Sedangkan perbandingan atau selish LO-LRA pada akun beban perjalanan dinas sebesar Rp0,00.

6) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 374.126.099,28 sedangkan pada tahun 2022 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 298.786.367,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 75.339.732,28 atau naik sebesar 25,22%.

b. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional tahun 2023, berdasarkan realisasi beban Rp 5.771.071.780,28 maka SKPD Dinas Ketenagakerjaan mengalami surplus/defisit sebesar Rp 5.771.071.780,28 Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2022 sebesar Rp 6.687.641.007,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 916.569.226,72 atau turun sebesar 13,71%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2023(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan	-		-	#DIV/0!
Beban	5.771.071.780,28	6.687.641.007,00	(916.569.226,72)	86,29
Jumlah	(5.771.071.780,28)	(6.687.641.007,00)	916.569.226,72	86,29



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.024.702.186,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2022.

b. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.777.971.093,28 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

c. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2023.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 11.602.261.588,85.

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2023 yaitu sebesar Rp 13.848.992.681,57 dan apabila dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp 8.024.702.186,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp 5.824.290.495,57 atau naik sebesar 72,57%.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023, posisi keuangan per 31 Desember 2023 serta kinerja SKPD.

Selanjutnya informasi dalam laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian laporan keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2022. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2 Januari 2024

Kepala SKPD Dinas Ketenagakerjaan

RAKHMAT NURUL FADILAH, S.Pd, M.Si